

KATALOG: 3205011.3322



ANALISIS

KEMISKINAN

KABUPATEN SEMARANG

2021



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG



ANALISIS

KEMISKINAN

KABUPATEN SEMARANG

2021

ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG 2021

ISSN/ISBN : -
No. Publikasi : 33220.2233
Katalog : 3205011.3322

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 52 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Desain Kover oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Pencetak :

Alfaprinting

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Ir. Sri Wiyadi, M.M.

Penyunting

Wiwit Santi W, S.ST, M.Si

Penulis

Wiji Nograho, S.ST, M.Si.

Annie Yuliati, S.Si

Penata Letak

Annie Yuliati, S.Si

Desain Kulit

Wiji Nograho, S.ST, M.Si.

KATA PENGANTAR

Data dan informasi kemiskinan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Susenas pada bulan Maret memberikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Susenas pada bulan September menghasilkan angka estimasi pada tingkat provinsi.

Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2021 memberikan informasi lengkap mengenai kemiskinan dan variabel-variabel pendukungnya beserta kaitannya dengan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat lainnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan kerjasama sehingga Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2021 ini selesai dengan baik. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan di masa datang.

Ungaran, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Semarang,



Sri Wiyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 TUJUAN	6
1.3 CAKUPAN WILAYAH	6
1.4 METODOLOGI	7
1.4.1 METODE PENGHITUNGAN	7
1.4.2 KONSEP DAN DEFINI.....	9
PERKEMBANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG	15
2.1 PENDUDUK MISKIN	19
2.2 INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN.....	21
2.3 PENDIDIKAN.....	22
2.4 KETENAGAKERJAAN	26
2.5 PERUMAHAN.....	28
2.6 KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN PEREKONOMIAN.....	30
DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SEMARANG 2021.....	33
TABEL-TABEL	41
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2021	39
Tabel 2. Persentase Rata-Rata Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (persen), 2021	40
Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021	43
Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021.....	43
Tabel 5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021.....	43
Tabel 6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021.....	43
Tabel 7. Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021.....	44
Tabel 8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021.....	44
Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021.....	45
Tabel 10. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2021.....	45
Tabel 11. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Bekerja di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021.....	46
Tabel 12. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Formal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021	46
Tabel 13. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Informal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021	47
Tabel 14. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021	47
Tabel 15. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Non Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015 - 2021	48
Tabel 16. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Semarang Menurut Status Bekerja Tahun 2015 -2021.....	48
Tabel 17. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021.....	49
Tabel 18. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 -2021.....	49

	Hal
Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/ Bersama di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2021....	49
Tabel 20. Indikator Makro di Kabupaten Semarang Selama Rentang Waktu Tahun 2017 - 2021.....	50
Tabel 21. Indikator Makro di Provinsi Jawa Tengah Selama Rentang Waktu Tahun 2017 - 2021.....	50
Tabel 22. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Kota sekitar Kabupaten Semarang Tahun 2021.....	50

<https://semarangkab.bps.go.id>

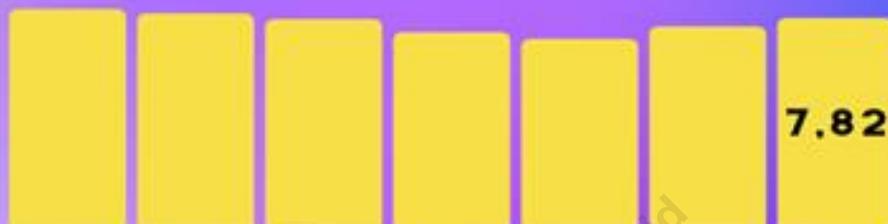
DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2021.....	19
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021.....	20
Gambar 3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2021	21
Gambar 4. Angka Melek Huruf Usia 15- 55 Tahun Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2021.....	23
Gambar 5. Angka Melek Huruf Usia 15- 24 Tahun Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2021.....	23
Gambar 6. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2021.....	24
Gambar 7. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2021.....	25
Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2015 - 2021.....	26
Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2018- 2021.....	27
Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2015 - 2021.....	28
Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021.....	29
Gambar 12. Indikator Makro di Kabupaten Semarang Selama Rentang Waktu Tahun 2017 - 2021.....	30
Gambar 13. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Semarang Selama Rentang Waktu Tahun 2019-2021.....	37
Gambar 14. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Beberapa Kabupaten/ Kota di Sekitar Kabupaten Semarang Tahun 2021.....	38



PENDAHULUAN

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang 2021



Tahun 2021

7,82

Kemiskinan

adalah ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (World Bank, 2006)



Persentase Penduduk Miskin Beberapa Kabupaten Kota di sekitar



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

WorldBank (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya kesejahteraan yang terdiri dari berbagai komponen dimensi. Pendekatan terluas tentang kemiskinan adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar. Selanjutnya *World Bank* dan *UNDP (United Nations of Development Programme)* menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subyektif (Locatelli, 2009;28).

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi semua bangsa terutama bagi negara-negara berkembang. Hingga saat ini pemerintah telah menjalankan dan merealisasikan berbagai skema dan sistem untuk menekan laju kemiskinan. Hal ini dilakukan agar kestabilan pembangunan sebagai tujuan utama dapat tercapai.

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah berupaya mendorong perekonomian serta menjaga daya konsumsi masyarakat melalui banyak program. Dalam hal ini tentu saja kondisi perekonomian global dan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian secara langsung. Sehingga pada tahun 2020 situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat terdampak secara nyata.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kewenangan dan tugas untuk menyediakan data kemiskinan melakukan kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) secara periodik. Penyediaan data kemiskinan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada Bulan Maret dan September. SUSENAS Maret untuk estimasi data kemiskinan hingga level kabupaten/kota sedangkan SUSENAS September untuk estimasi data kemiskinan hanya sampai pada level provinsi.

SUSENAS bukan hanya mencakup data kemiskinan namun merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tujuan pembangunan internasional yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

1.2 TUJUAN

Publikasi ini disusun agar memberikan data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 agar dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan evaluasi maupun perencanaan pembangunan.

1.3 CAKUPAN WILAYAH

Wilayah yang dicakup dalam publikasi ini adalah seluruh Kabupaten Semarang. Dimana jumlah sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat kemiskinan Kabupaten Semarang sebanyak 870 rumah tangga yang tersebar di 19 Kecamatan yang merupakan sampel SUSENAS Maret 2021.

1.4 METODOLOGI

Unit observasi yang dicakup dalam publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2021 adalah rumah tangga sampel SUSENAS Maret 2021. Survei dilakukan dengan pendekatan rumah tangga pada wilayah kerja (blok sensus). Hasil estimasi SUSENAS Maret disajikan hingga tingkat kabupaten/kota.

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel yang lebih representatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan stratifikasi menurut urban/rural pada seluruh populasi blok sensus biasa hasil SP2010. *Implicit stratification* rumah tangga dilakukan berdasarkan

tingkat pendidikan kepala rumah tangga untuk menjaga keterwakilan dari nilai keragaman karakteristik rumah tangga.

1.4.1 METODE PENGHITUNGAN

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Langkah pertama adalah menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat kabupaten/kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GK_{ij}^{t-1} \times (1 + (E_j \times I_{ij}))$$

Dimana :

GKS_{ij}^t = Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* di tahun *t*

GK_{ij}^{t-1} = Garis Kemiskinan kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* di tahun *t-1*

E_j = Elastisitas provinsi ke-*j* (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-*j* terhadap inflasi provinsi ke-*j*)

I_{ij} = Inflasi kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j*

Catatan :

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-*i* digunakan elastisitas provinsi ke-*j* di level perdesaan.
- Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-*i* digunakan elastisitas provinsi ke-*j* di level perkotaan.
- Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*)

Langkah selanjutnya adalah menentukan persentase penduduk miskin (P_o) sementara kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* yaitu dengan cara mengalihkan pertumbuhan P_o provinsi ke-*j* periode *t* ke *t-1* dengan P_o kabupaten ke-*i* pada tahun *t-1*. Langkah berikutnya adalah menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik

potong antara GKS dan P_0 sementara. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z =gariskemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

1.4.2 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi mencakup pengertian, batasan serta cakupan yang ingin dibahas dalam Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2021.

1.4.2.1 KEMISKINAN

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (*World Bank*, 2006). Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (UU No. 24 Th 2004).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi seseorang yang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan atau dikenal sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Nugroho dan Dahuri, 2012).

- Kemiskinan absolut menyatakan seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kelebihan konsep kemiskinan absolut adalah bisa dibandingkan antarwaktu dan antardaerah, dengan catatan definisi kemiskinan tidak mengalami perubahan.
- Kemiskinan relatif menyatakan seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar. Dalam hal ini garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antardaerah dan antarwaktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Namun, untuk menentukan sasaran program yang ditujukan untuk penduduk miskin, ukuran kemiskinan relatif dapat digunakan.

Indikator yang sering disorot oleh pemerintah daerah adalah P0. P0 didefinisikan sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

1.4.2.2 PENDIDIKAN

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan tingkat pendidikan penduduk miskin menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

1.4.2.3 KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.

Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan). Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari seseorang yang berusaha

mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu seminggu yang lalu. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu semingguyang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkanseminggu yang lalu masih mencari pekerjaan. Jadi dalam kategori ini jugatermasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menungguhasilnya.

Yang digolongkan mencari pekerjaan antara lain: seseorang yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karenasuatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain; seseorang yang sedang dibebastugaskan dari pekerjaan dan akan dipanggil kembali, tetapisedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain; seseorang yang belum pernah bekerja dan sedang berusahamendapatkan pekerjaan; seseorang yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu halberhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha mendapatkanpekerjaan; seseorang yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dansedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan jumlah penduduk pengangguran terhadap penduduk yang aktif secara ekonomi atau penduduk angkatan kerja.

1.4.2.4 FASILITAS PERUMAHAN

Air terlindung adalah leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah ≥ 10 meter.

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak *sustain* (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi, cuci, dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

1.4.2.5 PROGRAM PEMERINTAH

Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras sejahtera (Rastra). Program Rastra (sebelumnya disebut program Beras Miskin/Raskin) adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

Rumah Tangga Miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial pangan BPNT yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur. Bahan pangan dalam program BPNT ini berbentuk beras dan/atau telur.

1.4.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Indeks harapan hidup diwakili ukuran yang disebut Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Indeks pendidikan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan indeks standar hidup layak diukur dengan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke

atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam pendataan Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

1.4.2.7 PERTUMBUHAN EKONOMI

Selain itu konsep yang akan digunakan dalam publikasi ini adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). LPE adalah laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan perkembangan produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada suatu wilayah pada tahun tertentu. LPE menggambarkan perkembangan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan.



PERKEMBANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG

<https://semarangkab.go.id>

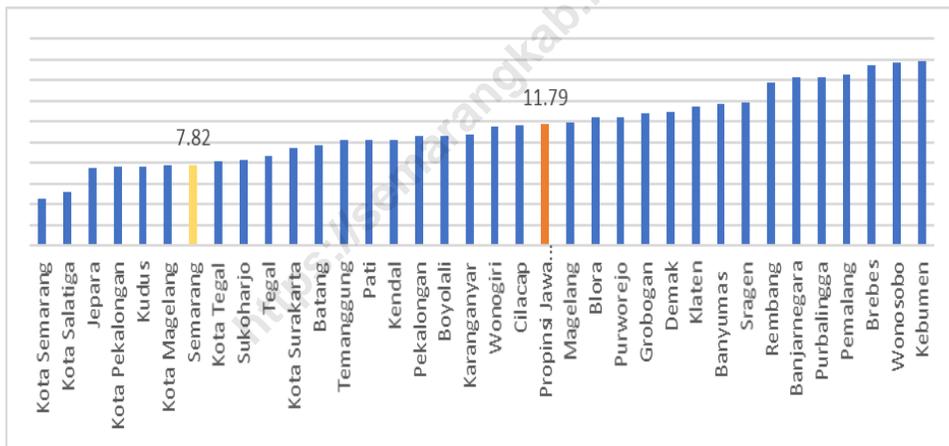
INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SEMARANG 2021



PERKEMBANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG

2.1 PENDUDUK MISKIN

Persoalan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya tingkat penganggaran atau kekayaan sumber daya alam (SDA) semata, namun merupakan kajian multidimensi yang memerlukan pencermatan mendalam. Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang menempati urutan ke-7 (tujuh) terkecil jika disandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sebesar 7,82 persen ini lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 11,79 persen pada tahun 2021.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Namun demikian jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan tahun sebelumnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang mengalami kenaikan sebesar 0,31 poin persen, yaitu 7,51 persen di tahun 2020 menjadi 7,82 persen di tahun 2021. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pandemi Covid-19 yang secara global melanda dunia dan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi pada hampir semua negara.

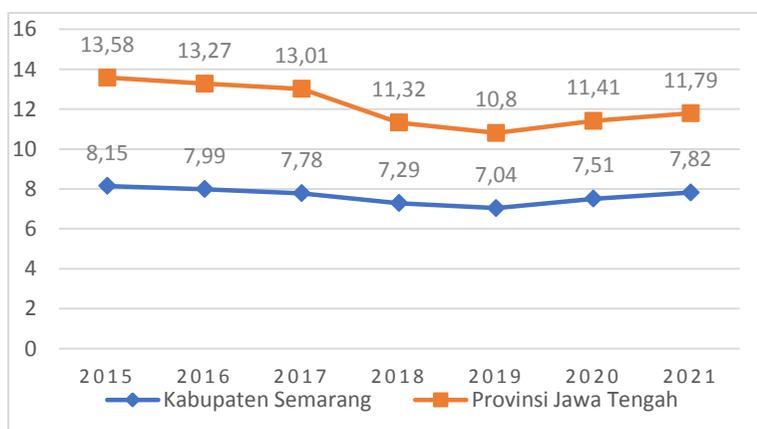
Kemiskinan di Kabupaten Semarang sebesar 7,82 persen ini setara dengan kurang lebih 83,61 ribu penduduk miskin. Artinya, selama periode tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak hampir 3,73 ribu penduduk.

Sementara jika dilihat di tingkat provinsi, kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 128,85 ribu penduduk.

Gambar 2 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang mengalami pola terus menurun. Namun di tahun 2020 dan 2021 baik Kabupaten Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terbatasnya aktivitas dan pergerakan penduduk yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan ekonomi. Sehingga hal ini memberikan tekanan ekonomi hingga pada penduduk di tingkat bawah.

Jika kita lihat perkembangan persentase kemiskinan baik di tingkat Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, mengalami tren menurun hingga tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa persentase dan jumlah kemiskinan mempunyai pola yang sama.

Penurunan persentase penduduk miskin yang paling besar terjadi pada tahun 2018 dimana 1,69 persen poin penduduk Jawa Tengah tidak lagi masuk dalam kelompok penduduk miskin. Begitu juga di Kabupaten Semarang terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,49 persen poin. Tiga faktor utama penyebab turunnya tingkat kemiskinan ini diantaranya adalah tingkat pengendalian inflasi yang terjaga, peningkatan nilai tukar petani, serta bantuan sosial pemerintah yang tepat waktu.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021

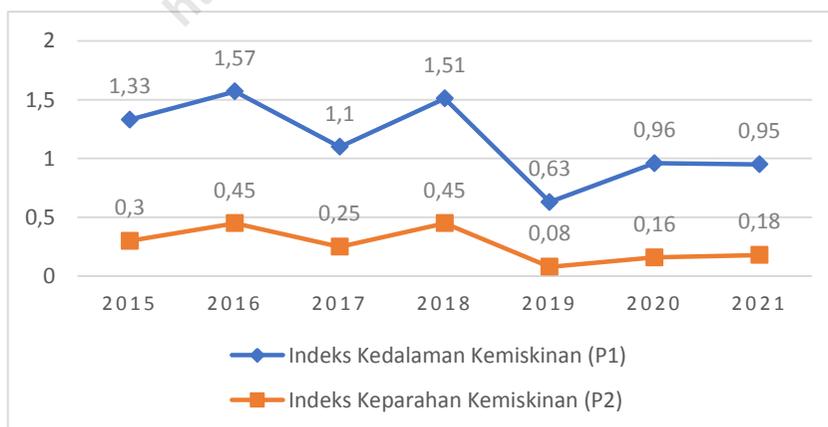
Dalam melihat kondisi kemiskinan, perlu ditelaah juga nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran minimal seorang individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan batas seseorang dikatakan miskin atau tidak.

Garis kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 416.395,- per kapita per bulan yang berarti bahwa seseorang dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan tersebut akan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin. Perlu diingat bahwa nilai ini adalah untuk satu individu (per kapita). Sehingga jika dalam satu rumah tangga terdiri dari lima orang maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari 5 x Rp 416.395,- atau sebesar Rp 2,081.975,- setiap bulan.

Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2018 nilai garis kemiskinan di Kabupaten Semarang tercatat lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Namun, sejak tahun 2019 hingga 2021 nilai garis kemiskinan di Kabupaten Semarang lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

2.2 INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN

Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pada periode tahun 2015 hingga 2021 indeks kedalaman kemiskinan mengalami kecenderungan menurun.



Gambar 3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2021

Indeks keparahan kemiskinan dan Indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi, jika dihubungkan dengan kondisi perekonomian

secara nasional memang mengalami tekanan. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang 2015 sebesar 5,52 persen dan pada tahun 2019 menjadi 5,39 bahkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kontraksi diakibatkan adanya pandemi Covid-19.

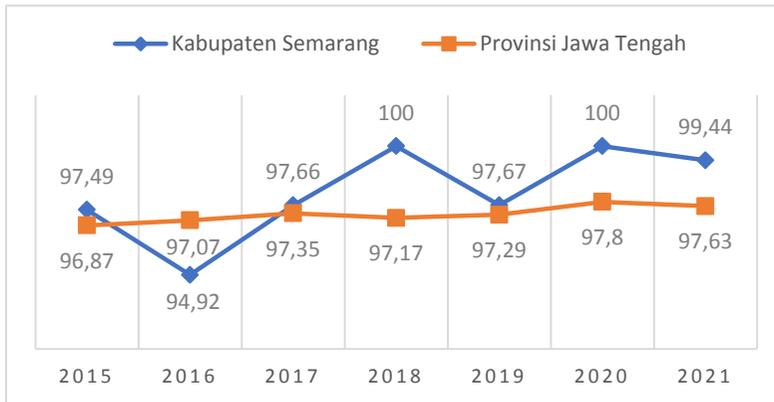
Kondisi perekonomian yang mengalami tekanan, tentunya akan berdampak pada pengeluaran penduduk, mengakibatkan pengeluaran penduduk miskin juga tertekan. Terlihat bahwa P1 dan P2 naik selama 2019 hingga 2020, hal ini dapat diartikan bahwa penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Akibatnya, pemerintah memerlukan banyak biaya dan program untuk mengangkat penduduk miskin melewati garis kemiskinan.

Namun demikian, jika dilihat selama tahun 2015-2021 kedua indeks ini mengalami kecenderungan menurun. Tentunya keadaan ini merupakan hasil nyata dari adanya campur pemerintah dalam program kesehatan, perumahan, investasi, penyediaan pupuk, serta pembangunan dari pemerintah daerah secara umum hingga meningkatnya anggaran desa untuk kemiskinan.

2.3 PENDIDIKAN

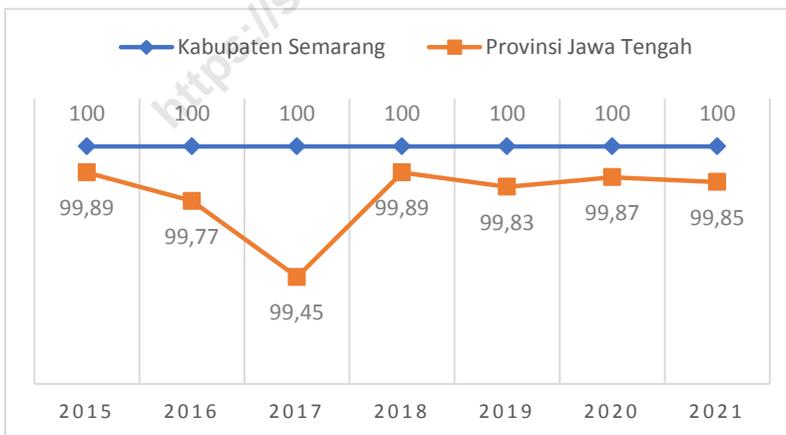
Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional, menyangkut berbagai hal diantaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kondisi tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Dengan demikian, selain jumlah dan pola penduduk miskin di suatu wilayah, analisis mengenai karakteristik penduduk miskin juga perlu dilakukan. Untuk pendidikan, bisa kita lihat beberapa karakteristik diantaranya angka melek huruf dan partisipasi sekolah.

Berdasarkan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021, angka melek huruf penduduk miskin usia 15-55 tahun di Kabupaten Semarang mengalami kecenderungan meningkat, dan sejak tahun 2017 levelnya berada di atas rata-rata angka melek huruf penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum penduduk miskin di Kabupaten Semarang telah bebas dari buta huruf atau sudah bisa membaca dan menulis.



Gambar 4. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Usia 15- 55 Tahun Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Selanjutnya kita akan melihat kondisi penduduk pada rentang umur 15 tahun hingga 24 tahun secara lebih detail. Rentang umur ini dianggap sebagai perkembangan awal penduduk usia produktif. Sehingga angka melek huruf pada kelompok umur ini dapat menggambarkan secara lebih spesifik penduduk miskin di usia muda dibandingkan angka melek huruf pada rentang umur 15-55 tahun.

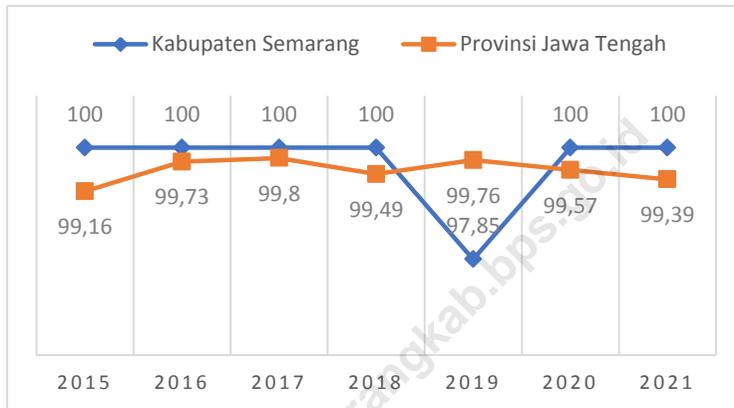


Gambar 5. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Usia 15- 24 Tahun Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2015-2021

Angka melek huruf penduduk miskin usia 15 hingga 24 tahun di Kabupaten Semarang pada periode tahun 2015-2021 sudah mencapai nilai maksimal, yang artinya bahwa semua penduduk miskin usia 15-24 tahun di Kabupaten Semarang sudah dapat

membaca dan menulis. Angka ini tentunya telah melampaui capaian angka melek huruf penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada rentang usia yang sama.

Gambar 6 menunjukkan karakteristik penduduk miskin dari sisi pendidikan yang dilihat berdasarkan partisipasi sekolahnya pada usia pendidikan dasar yakni usia 7 hingga 12 tahun. Angka partisipasi sekolah penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang selama periode 2015 hingga 2020 selalu berada pada angka 100 kecuali pada tahun 2019 sebesar 97,85.

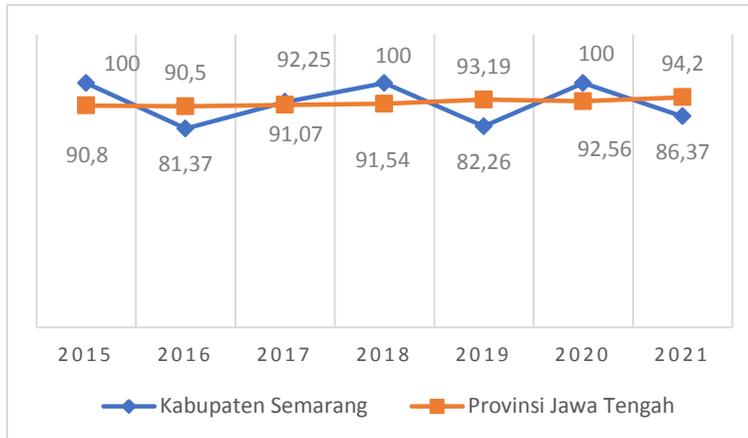


Gambar 6. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Ini berarti bahwa hampir seluruh penduduk miskin usia sekolah dasar di Kabupaten Semarang telah masuk pendidikan di jenjang formal, baik SD atau MI atau bahkan SMP atau MTS.

Selanjutnya kita lihat untuk partisipasi sekolah di usia 13-15 tahun secara spesifik. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 13-15 tahun pada tahun 2015-2021 di Kabupaten Semarang selalu mencapai di atas 80 persen. Artinya bahwa lebih dari 80 persen penduduk miskin usia 13-15 tahun di Kabupaten Semarang pada tujuh tahun terakhir sudah bersekolah semua.

Program-program unggulan Dinas Pendidikan seperti Kartu Serasi Pintar, Pembebasan biaya paket A/B/C, layanan transportasi pendidikan, bantuan layanan internet untuk sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Semarang perlu dipertahankan untuk meningkatkan capaian indikator pendidikan di Kabupaten Semarang.

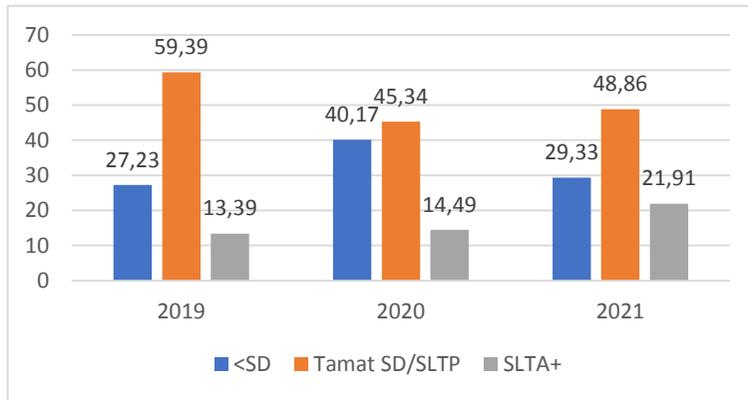


Gambar 7. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan tentunya karena dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta kemudahan akses ke fasilitas tersebut. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2021 tercatat seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang telah memiliki fasilitas SD/ sederajat. Sedangkan untuk tingkat SMP/ sederajat sebanyak 107 desa/kelurahan memiliki fasilitas pendidikan ini. Sedangkan untuk tingkat SMA/ sederajat jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan ini adalah 35 desa/kelurahan.

Jumlah fasilitas pendidikan pada tahun 2021 untuk beberapa jenjang pendidikan sebagai berikut, SD sebanyak 500 sekolah, MI sebanyak 164 sekolah, SMP sebanyak 101 sekolah, MTS sebanyak 40 sekolah, SMA sebanyak 26 sekolah, MA sebanyak 11 sekolah serta SMK sebanyak 43 sekolah.

Selain itu jika dilihat dari rasio guru dibandingkan dengan murid memberikan hasilyang baik. Untuk tingkat SD/ sederajat rasio guru dibandingkan dengan murid menunjukkan nilai 13-15 yang berarti bahwa setiap guru bertanggung jawab terhadap kurang lebih 13-15 murid. Untuk tingkat SMP/ sederajat menunjukkan nilai 12-18, sedangkan untuk tingkat SMA/ sederajat juga menunjukkan nilai 12-18.



Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2015-2021

Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Semarang didominasi oleh mereka yang berpendidikan SLTP ke bawah. Penduduk dengan pendidikan SLTP ke bawah tentunya akan kalah bersaing dalam meraih kesempatan kerja dengan upah tinggi. Peluang untuk terlibat sebagai pekerja formal juga relatif kecil. Hal yang harus kita pahami juga, mahalannya fasilitas pendidikan dan belum meratanya pelayanan publik di suatu wilayah membuat pendidikan masih terbilang eksklusif. Ditemukan bahwa rumah tangga miskin terjebak dalam *Poverty Trap*, bahwa kemiskinan membawa dampak dimana anak yang terlahir dari keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah, sehingga produktivitasnya rendah dan cenderung bekerja di sektor yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya anak dari keluarga miskin akan bertahan hidup dan berkembang menjadi orang dewasa miskin, lalu akan mentransfer kemiskinan kepada anak-anaknya dimasa mendatang saat menjadi orang tua (Chzhen et al., 2017).

2.4 KETENAGAKERJAAN

Selain pendidikan, karakteristik ketenagakerjaan juga perlu kita lihat dalam melakukan analisis kemiskinan. Berdasarkan Gambar 9, penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 yang berstatus tidak bekerja sebesar 40,75 persen. Artinya lebih dari sepertiga penduduk miskin di Kabupaten Semarang tidak bekerja. Sedangkan jika dilihat dari jenis pekerjaannya mereka yang bekerja dan berstatus miskin didominasi

penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian. Hasil ini tentunya berbeda dengan kondisi secara umum yang menyatakan bahwa penduduk miskin didominasi mereka yang bekerja pada sektor pertanian.

Jika melihat tren dan pola yang terjadi, selama tiga tahun terakhir sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Semarang bekerja di sektor informal. Sektor informal yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Pada tahun 2021, penduduk miskin yang bekerja di sektor informal tercatat sebesar 41,66 persen. Lebih besar dibandingkan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal yakni sebesar 17,59 persen.



Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2018-2021

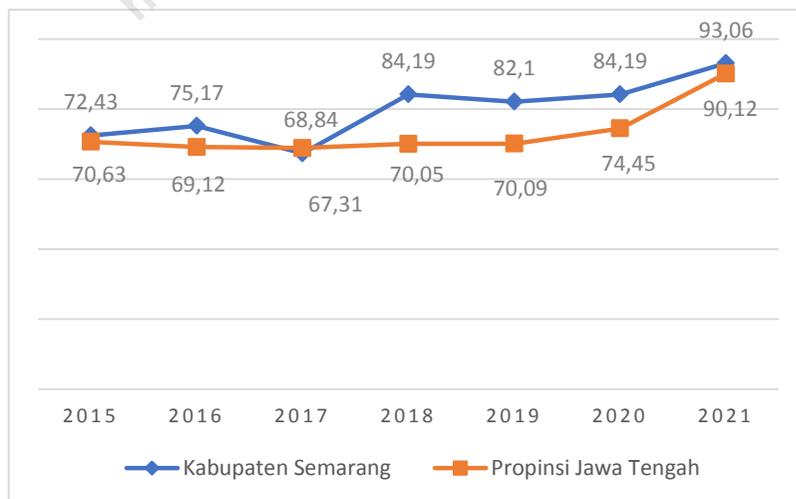
Sektor informal sering disebut berfungsi sebagai "*safety belt*", yang menopang ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warganya. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, sehingga mengurangi pengangguran. Namun sayangnya, sektor ini dikenal dengan kondisi keadaan kerja tidak layak, tingkat pendapatan rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berisiko tinggi, tingkat keamanan serta perlindungan kerja rendah. Bentuk yang tidak terorganisir, tidak teratur, tidak terdaftar, dan cenderung berskala kecil merupakan ciri usaha di sektor informal. Pekerja di sektor ini umumnya berkeahlian

rendah sehingga hanya mampu menggunakan teknologi yang sederhana. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan upah/pendapatan. Sehingga kemiskinan dan pekerja informal merupakan dua faktor yang saling terkait dan saling berpengaruh.

Berdasarkan data Sakernas 2021, terdapat lebih dari 12 persen penduduk usia kerja terdampak Covid-19, baik menjadi pengangguran karena Covid-19, pengurangan jam kerja, menjadi bukan angkatan kerja (misalnya menjadi ibu rumah tangga, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi). Selain itu Covid-19 sangat berdampak pada UMKM dikarenakan harus mengikuti aturan PPKM dan sejenisnya untuk pengendalian pandemi. Sehingga akan langsung berdampak pada penduduk miskin yang bekerja pada sektor ini.

2.5 PERUMAHAN

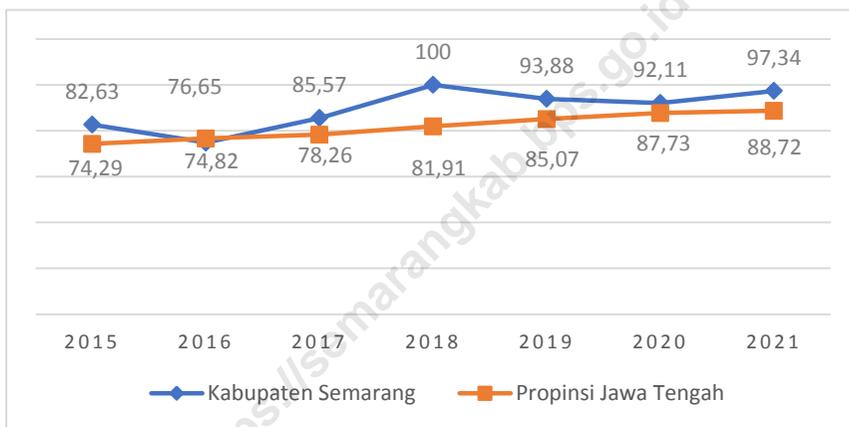
Pada kategori perumahan, informasi yang dapat memperkaya analisis pada publikasi ini adalah penggunaan air layak serta penggunaan tempat buang air besar atau jamban. Pada Gambar 10 di bawah menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen penduduk miskin di Kabupaten Semarang sudah menggunakan air layak untuk keperluan sehari-hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penggunaan air layak pada penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2015-2021

Tren penggunaan air layak terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Ini terjadi di Kabupaten Semarang maupun secara umum di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 penggunaan air layak oleh penduduk miskin di Kabupaten Semarang sudah tercatat mencapai 93,06 persen.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan penggunaan jamban untuk buang air besar, pada tahun 2021 tercatat sebesar 97,34 persen penduduk miskin di Kabupaten Semarang menggunakan jamban sendiri/bersama. Dimana jika dibandingkan dengan keadaan rata-rata Jawa Tengah maka secara umum kondisi di Kabupaten Semarang memiliki capaian yang lebih tinggi dan lebih baik.



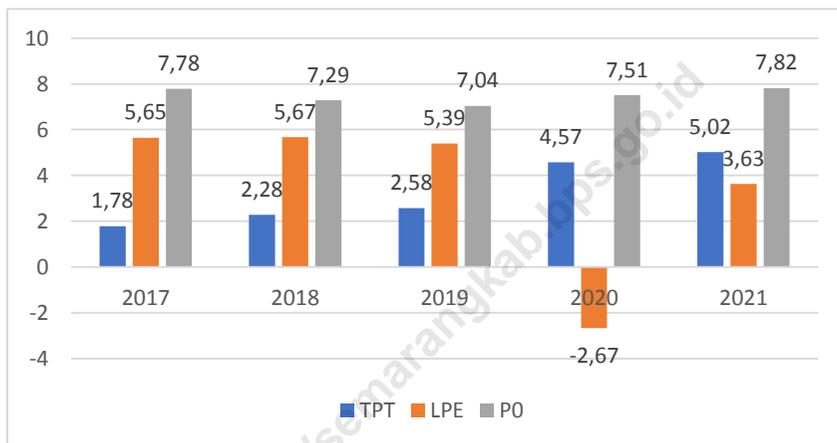
Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Pengukuran indikator dan gambaran terkait kesehatan dan perumahan penting untuk dilakukan. Suatu negara yang sehat berawal dari diri sendiri dan keluarga yang sehat juga. Salah satunya adalah dengan adanya program PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat). Akses pada sanitasi khususnya pada penggunaan jamban sehat, saat ini memang masih menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Masih tingginya angka buang air besar pada sembarang tempat atau *open defecation*, menjadi salah satu indikator rendahnya akses ini. Kondisi ini dapat mengakibatkan pencemaran penyakit yang berakibat pada kondisi kesehatan suatu keluarga. Penggunaan jamban yang sehat perlu dipantau dan dituntaskan pada seluruh penduduk. Demikian juga untuk penggunaan air layak. Keduanya menjadi target pada

pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan dituntaskan oleh seluruh negara di dunia.

2.6 KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN PEREKONOMIAN

Dalam berbagai kesempatan, kondisi kemiskinan seringkali dikaitkan dengan berbagai indikator makro lainnya, diantaranya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif.



Gambar 12. Indikator Makro di Kabupaten Semarang Selama Rentang Waktu Tahun 2017-2021

Gambar 12 di atas menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Semarang pada tahun 2021 perlahan mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 3,63 persen. Namun jika dilihat dari sisi angka pengangguran terjadi peningkatan dari 4,57 persen pada tahun 2020 menjadi 5,02 persen pada tahun 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu 7,82 persen yang sebelumnya pada 7,51 persen pada tahun 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Semarang yang secara umum ditopang oleh sektor industri pengolahan dan pariwisata belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi penduduknya. Selain itu perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang juga belum mampu memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi penduduk miskin. Bagi

penduduk miskin, sebagian besar pendapatan hanya akan dibelanjakan untuk kebutuhan pangan, sehingga jika kebutuhan pokok tersebut belum mampu terpenuhi baik disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima maupun karena adanya kenaikan harga, maka akan sulit bagi penduduk tersebut terlepas dari jurang kemiskinan.

Memang bukanlah hal instan untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan yang bersifat multidimensional. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar kemiskinan di Kabupaten Semarang bisa kembali seperti tren sebelum pandemi Covid-19.

<https://semarangkab.bps.go.id>



**DISTRIBUSI PENGELUARAN
PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG 2021
BERSADARKAN KRITERIA BANK DUNIA**

DISTRIBUSI PENGELUARAN

PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG 2021

BERDASARKAN KRITERIA BANK DUNIA

40 % Bawah

18,33%

40 % Tengah

36,48%

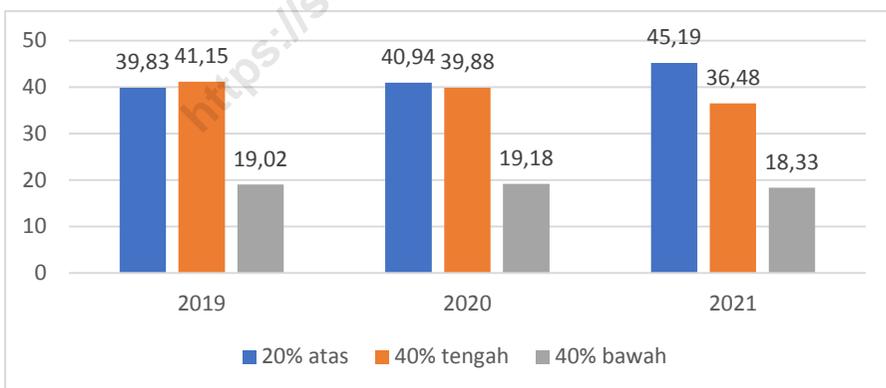
20 % Atas

45,19%

DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG 2021 BERDASARKAN KRITERIA BANK DUNIA

World Bank (2006) membagi penduduk menjadi tiga kelompok distribusi pengeluaran per kapita yaitu 20% penduduk dengan pengeluaran teratas, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah dan 40% penduduk dengan pengeluaran terendah.

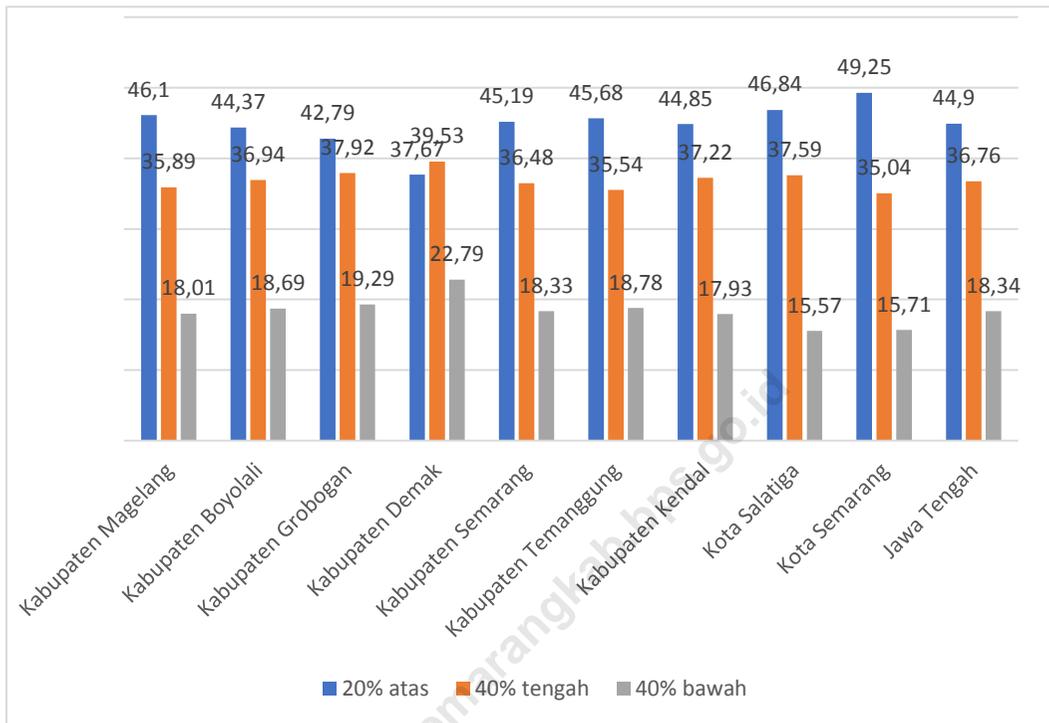
Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*) terjadi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12 persen. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*) terjadi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah berada di antara 12 persen sampai dengan 17 persen. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*) terjadi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah berada di atas 17 persen.



Gambar 13. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Semarang Selama Rentang Waktu Tahun 2019-2021

Menurut Gambar 13 selama kurun waktu 2019 hingga 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Semarang berada pada kategori *low inequality* dimana pada tahun 2019 pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah sebesar 19,02 persen, tahun 2020 sebesar 19,18 persen dan tahun 2021 pada 18,33 persen.

Terjadi sedikit penurunan pengeluaran pada periode tahun 2020 hingga 2021 yaitu sebesar 0,85 persen poin.



Gambar 14. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Beberapa Kabupaten/ Kota di Sekitar Kabupaten Semarang Tahun 2021

Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Semarang, ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Semarang masih cukup baik. Pengeluaran 18,33 persen pada penduduk 40% terbawah di Kabupaten Semarang hampir sama dengan angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 18,34 persen. Kota Salatiga dan Kota Semarang bahkan masih pada level ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*) dimana pengeluaran pada penduduk 40% terbawah kurang dari 17 persen.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan secara lebih mikro lagi yaitu dalam rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran

kesejahteraan rumah tangga tersebut. Atau dengan kata lain proporsi pengeluaran konsumsi makanan dapat digunakan sebagai proksi atau pendekatan kesejahteraan.

Rumah tanggadengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Semarang berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar 1,1 juta rupiah. Artinya dalam satu bulan, setiap penduduk di Kabupaten Semarang secara rata-rata mengeluarkan uang untuk kebutuhan setara 1,1 juta rupiah. Jika dalam satu rumah tangga ada 4 orang, maka rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar 4,4 juta rupiah.

Dari 1,1 juta rupiah tersebut, dibagi menjadi 2 komoditas besar yakni makanan dan non makanan. Untuk tahun 2021, pengeluaran makanan per kapita dalam sebulan secara rata-rata adalah 525 ribu rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan per kapita sebulan sebesar 575 ribu rupiah.

Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2021

Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	289 305	544 908	960 534	525 766
Non Makanan	214 971	460 221	1 526 645	575 438
Pengeluaran	504 276	1 005 129	2 487 179	1 101 204

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2021

Selanjutnya jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran yang diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapita sebulan akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni penduduk yang berada di 40 persen penduduk terbawah, 40 persen penduduk menengah, dan 20 persen penduduk dengan pengeluaran per kapita teratas. Dari tabel di atas terlihat bahwa semakin tinggi kelompok pengeluaran maka semakin besar pengeluaran makanannya. Adapun persentasenya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (persen), 2021

Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	57,37	54,21	38,62	47,74
Non Makanan	42,63	45,79	61,38	52,26
Pengeluaran	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2021

Dilihat dari tabel di atas, bahwa persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok pengeluaran yang semakin tinggi akan memperbesar persentase pengeluaran komoditas non makanan. Terlihat pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas tercatat mencapai 61,38 persen. Sedangkan secara rata-rata seluruh penduduk, pengeluaran per kapita komoditas non makanan sebesar 52,26 persen.

Kondisi ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa penduduk di Kabupaten Semarang secara umum atau rata-rata berada pada tingkat kesejahteraan yang baik. Mengingat di negara berkembang pengeluaran penduduk rata-rata didominasi oleh pengeluaran komoditas makanan.

Namun demikian, jika diperhatikan pada dua kelompok lainnya, pengeluaran komoditas makanan masih mendominasi (di atas 50 persen).



TABEL-TABEL

<https://semarang.kota.go.id>

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	8,15	7,99	7,78	7,29	7,04	7,51	7,82
Provinsi Jawa Tengah	13,58	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	11,79

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021

Jumlah Penduduk Miskin*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	81,25	80,72	79,66	75,67	73,9	79,88	83,61
Provinsi Jawa Tengah	4 557,04	4 506,9	4 450,7	3 897,2	3 743,23	3 980,9	4 109,75

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Ket: *dalam ribuan

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021

P1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	1,33	1,57	1,10	1,51	0,63	0,96	0,95
Provinsi Jawa Tengah	2,44	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72	1,91

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021

P2	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	0,30	0,45	0,25	0,45	0,08	0,16	0,18
Provinsi Jawa Tengah	0,65	0,63	0,57	0,45	0,3	0,34	0,45

Sumber : SUSENAS MARET 2015- 2021

Tabel 5. Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021

GK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	286 918	307 505	317 935	341 576	377 674	404 455	416 395
Provinsi Jawa Tengah	297 851	317 348	333 224	350 875	369 385	395 407	409 193

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota di sekitar Kabupaten Semarang Tahun 2015-2021

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Magelang	13,07	12,67	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91
Boyolali	12,45	12,09	11,96	10,04	9,53	10,18	10,62
Grobogan	13,68	13,57	13,27	12,31	11,77	12,46	12,74
Demak	14,44	14,1	13,41	12,54	11,86	12,54	12,92
Semarang	8,15	7,99	7,78	7,29	7,04	7,51	7,82
Temanggung	11,76	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17
Kendal	11,62	11,37	11,1	9,84	9,41	9,99	10,24
Kota Salatiga	5,8	5,24	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14
Kota Semarang	4,97	4,85	4,62	4,14	3,98	4,34	4,56

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Wilayah	Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	<SD	36,06	34,35	38,48	26,11	27,23	40,17	29,33
	Tamat SD/SLTP	54,98	54,41	51,67	49,18	59,39	45,34	48,86
	SLTA+	8,96	11,24	9,85	24,7	13,39	14,49	21,91
Provinsi Jawa Tengah	<SD	35,47	30,96	30	31,82	30,31	29,51	28,05
	Tamat SD/SLTP	54,97	56,94	57,6	56,22	56,48	55,15	54,6
	SLTA+	9,56	12,1	12,4	11,97	13,21	15,34	17,35

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 8. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Uraian		Usia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	Angka Melek Huruf	15-24 th	100	100	100	100	100	100	100
		15-55 th	97,49	94,92	97,66	100	97,67	100	99,44
	Angka Partisipasi Sekolah	7-12 th	100	100	100	100	97,85	100	100
		13-15 th	100	81,37	92,25	100	82,26	100	86,37
Provinsi Jawa Tengah	Angka Melek Huruf	15-24 th	99,89	99,77	99,45	99,89	99,83	99,87	99,85
		15-55 th	96,87	97,07	97,35	97,17	97,29	97,8	97,63
	Angka Partisipasi Sekolah	7-12 th	99,16	99,73	99,8	99,49	99,76	99,57	99,39
		13-15 th	90,8	90,5	91,07	91,54	93,19	92,56	94,2

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Bekerja di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
2015	29,01	36,96
2016	33,87	38,28
2017	41,44	37,89
2018	38,40	39,93
2019	24,19	40,91
2020	38,78	40,83
2021	40,75	40,88

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 10. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Formal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
2015	10,83	16,29
2016	15,22	18,88
2017	18,12	17,49
2018	23,04	19,82
2019	22,90	19,77
2020	29,17	20,59
2021	17,59	17,92

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 11. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Informal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Presentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
2015	60,16	18,92
2016	50,91	42,84
2017	40,44	44,62
2018	38,56	40,25
2019	52,91	39,32
2020	32,05	38,59
2021	41,66	41,19

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2020

Tabel 12. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Presentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
2015	44,08	29,79
2016	50,91	42,84
2017	22,63	27,48
2018	6,04	18,51
2019	34,93	24,38
2020	21,41	23,44
2021	28,69	29,14

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2020

Tabel 13. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Non Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah Tahun 2015-2021

Tahun	Presentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
2015	26,91	33,25
2016	15,22	18,88
2017	35,93	34,63
2018	55,56	41,56
2019	40,88	34,71
2020	39,81	35,73
2021	30,56	29,98

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 14. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Semarang Menurut Status Bekerja Tahun 2015-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Menurut Status Bekerja				
	Tidak Bekerja	Bekerja Sektor Formal	Bekerja Sektor Informal	Bekerja Sektor Pertanian	Bekerja Sektor Non Pertanian
2015	29,01	10,83	60,16	44,08	26,91
2016	33,87	15,22	50,91	50,91	15,22
2017	41,44	18,12	40,44	22,63	35,93
2018	38,4	23,04	38,56	6,04	55,56
2019	24,19	22,9	52,91	34,93	40,88
2020	38,78	29,17	32,05	21,41	39,81
2021	40,75	17,59	41,66	28,69	30,56

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 15. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Wilayah	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	Miskin	54,67	57,39	61,32	56,94	61,21	63,19	58,99
	Tidak Miskin	61,92	51,52	52,78	51,96	53,01	53,53	53,12
Provinsi Jawa Tengah	Miskin	55,31	61,32	65,53	65,35	63,36	62,61	62,31
	Tidak Miskin	62,68	54,45	56,36	55,31	54,88	53,99	54,67

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 16. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	72,43	75,17	67,31	84,19	82,1	84,19	93,06
Provinsi Jawa Tengah	70,63	69,12	68,84	70,05	70,09	74,45	90,12

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 17. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/ Bersama di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2021

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	82,63	74,82	85,57	100	93,88	92,11	97,34
Provinsi Jawa Tengah	74,29	76,65	78,26	81,91	85,07	87,73	88,72

Sumber : SUSENAS MARET 2015-2021

Tabel 18. Indikator Makro di Kabupaten Semarang Selama Rentang Waktu Tahun 2017-2021

Tahun	TPAK	TPT	LPE	P0	IPM
2017	76,37	1,78	5,65	7,78	73,2
2018	72,22	2,28	5,67	7,29	73,61
2019	74,38	2,58	5,39	7,04	74,14
2020	75,07	4,57	-2,67	7,51	74,10
2021	74,10	5,02	3,63	7,82	74,24

Sumber : BPS

Tabel 19. Indikator Makro di Provinsi Jawa Tengah Selama Rentang Waktu Tahun 2017-2021

Tahun	TPAK	TPT	P0	LPE	IPM
2017	69,11	4,57	13,01	5,26	70,52
2018	68,56	4,51	11,32	5,30	71,12
2019	68,62	4,49	10,80	5,40	71,73
2020	69,43	6,48	11,41	-2,65	71,87
2021	69,58	5,95	11,79	3,32	72,16

Sumber : BPS

Tabel 20. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Kota sekitar Kabupaten Semarang Tahun 2021

Kabupaten / Kota	20% atas	40% tengah	40% bawah
Kabupaten Magelang	46,10	35,89	18,01
Kabupaten Boyolali	44,37	36,94	18,69
Kabupaten Grobogan	42,79	37,92	19,29
Kabupaten Demak	37,67	39,53	22,79
Kabupaten Semarang	45,19	36,48	18,33
Kabupaten Temanggung	45,68	35,54	18,78
Kabupaten Kendal	44,85	37,22	17,93
Kota Salatiga	46,84	37,59	15,57
Kota Semarang	49,25	35,04	15,71
Jawa Tengah	44,90	36,76	18,34

Sumber : SUSENAS MARET 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). Kajian Evaluasi Pembangunan Sektor: Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan. Jakarta: Kedepatian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas.
- BPS. (2020). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. (N. Sahrizal, N. Taufiq, & Masfufah, Eds.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021. Ungaran: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Hasbullah, J. (2012). Tangguh Dengan Statistik: Akurat Dalam Membaca Realitas Dunia. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. (2012). Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES
- World Bank. (2006). *Making the New Indonesia Work for the Poor*. The World Bank
- <https://jateng.bps.go.id/>
- <https://semarangkab.bps.go.id/>

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG*

Jalan Garuda No. 7 Ungaran 50511; Telp/Fax: (024) 6921029
Homepage: semarangkab.bps.go.id; email: bps3322@bps.go.id
